



### AKSI SOSIAL PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN BREBES UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

**Rahmawati Zulfiningrum**

*Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang  
rahmawati.zulfiningrum@dsn.dinus.ac.id*

---

**Info Artikel :**

Diterima : 9 Oktober 2021

Disetujui : 11 Oktober 2021

Dipublikasikan : 13 November 2021

---

**ABSTRAK**

*Aksi sosial memiliki orientasi adanya perubahan mendasar dalam struktur masyarakat. Proses dan hasil merupakan orientasi dari aksi sosial, melalui proses peningkatan kesadaran, pemberdayaan masyarakat, serta tindakan nyata masyarakat diorganisir sehingga dapat melakukan perubahan terhadap struktur kekuasaan untuk mewujudkan prinsip keadilan, demokratis, serta kesetaraan. Berdasarkan data peninjauan di lapangan terdapat cukup banyak sekolah yang berdekatan dengan potensi obyek wisata. Kondisi inilah yang memicu munculnya aksi sosial dalam rangka pengembangan desa wisata untuk melestarikan potensi yang ada sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode interview, observasi dan telaah literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya identifikasi dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Brebes diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai salah satu andalan pariwisata, terutama peningkatan sarana dan prasarana penunjang sebagai kelengkapan teknis operasional. Hal ini bertujuan agar desa wisata di Kabupaten Brebes dapat memiliki daya saing yang tinggi, dengan mengaplikasikan konsep pariwisata berkelanjutan yang partisipatif dan memperhatikan pengetahuan lokal, kapital sosial, serta kearifan lokal.*

**Kata Kunci :**  
*aksi sosial, desa wisata, pemberdayaan, rekayasa sosial.*

---

**ABSTRACT**

*Social action has the orientation of a fundamental change in the structure of society. The process and results are the orientation of social action, through a process of increasing awareness, community empowerment, and real community actions organized so that they can make changes to the power structure to realize the principles of justice, democracy, and equality. Based on the observation data in the field, there are quite a several schools that are close to potential tourism objects. This condition triggers the emergence of social action in the context of developing tourist villages to preserve the existing potential as well as improve the community's economy. This research uses interview, observation, and literature review methods. The results of the analysis show that identification efforts in the development of tourist villages in Brebes District are needed to improve the community's economy as one of the mainstays of tourism, especially increasing supporting facilities and infrastructure as operational technical completeness. It is intended that tourist villages in Brebes District can have high competitiveness, by applying the concept of participatory sustainable tourism and paying attention to indigeneous knowledge, social capital, and local wisdom.*

**Keywords :**  
*empowerment, social action, social engineering, tourist village*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Fluktuasi kesejahteraan di alami masyarakat Indonesia dalam beberapa era terakhir. Faktor makro ekonomi, faktor finansial, pemerintahan, serta menurunnya tingkat berdaya sangat mempengaruhi upaya bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemandirian, kemampuan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengakses pengelolaan sumberdaya dan adaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya tampak menurun yang menandakan bahwa melemahnya keberdayaan masyarakat (Sumardjo, 2010).

Tujuan dan sasaran utama dari aksi sosial (*social action*) adalah perubahan mendasar dalam institusi dan struktur masyarakat melalui proses distribusi kekuasaan, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering menjadi korban ketidakadilan struktural. Mereka miskin karena mereka dimiskinkan, mereka lemah karena mereka dilemahkan, dan mereka tidak berdaya karena mereka tidak diberdayakan oleh elit masyarakat yang menguasai sumber daya ekonomi, politik, dan sosial. Aksi sosial mengarah pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses pembangkitan kesadaran, pemberdayaan, dan tindakan nyata untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan.

*Action Theory* juga dikenal sebagai teori tindakan, pada awalnya dikembangkan oleh Max Weber, seorang sosiolog dan ekonom terkenal. Max Weber mengklaim bahwa seorang individu melakukan tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman, dan interpretasi dari objek atau situasi stimulus tertentu. Tindakan individu ini merupakan tindakan sosial yang rasional, khusus ditujukan untuk mencapai tujuan atau maksud dengan cara yang paling tepat. Teori Weber dikembangkan oleh Talcott Parsons, dia memulainya dengan mengkritik Weber dan menyatakan bahwa aksi atau *action* itu bukanlah perilaku atau behavior. Aksi adalah respons mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah proses mental yang aktif dan kreatif. Menurut Parsons, yang penting bukanlah tindakan individual, tetapi norma dan nilai sosial yang memandu dan mengatur perilaku. Kondisi obyektif dikombinasikan dengan komitmen kolektif terhadap nilai mengembangkan beberapa bentuk tindakan sosial.

Parsons menemukan bahwa tindakan individu atau kelompok dipengaruhi oleh tiga sistem, yaitu sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian individu. Kita dapat menghubungkan individu dengan sistem sosial melalui status dan peran mereka. Dalam sistem sosial apapun, individu menempati posisi atau status tertentu dan bertindak atau berperan sesuai dengan norma atau aturan yang ditetapkan oleh sistem tersebut, dan perilaku individu juga ditentukan oleh tipe kepribadian orang tersebut (Sarwono, 1993). Pariwisata sebagai sebuah industri baru telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Kemajuan dan kemakmuran yang semakin meningkat menjadikan pariwisata sebagai bagian penting dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan mendorong jutaan orang untuk belajar tentang alam dan budaya daerah lain. Pariwisata menciptakan hubungan antara ekonomi dengan industri jasa yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi global, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal dan regional.

Hal ini semakin mendorong tumbuh dan berkembangnya destinasi wisata yang ada di seluruh penjuru nusantara, baik di perkotaan, di pedesaan, bahkan di pedalaman dan pulau-pulau kecil. Kontribusi yang sangat penting ini menjadikan pariwisata sebagai

industri yang sangat strategis dengan potensi pengembangan dan menjadi salah satu ujung tombak penting dalam upaya peningkatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan manfaat operasionalnya, diperlukan penanganan yang serius dan profesional, yang dapat mencakup semua elemen penyusun pembangunan pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup, mandiri, dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan partisipasi yang lebih besar dari aparat pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan peluang dan menjamin keberlanjutan hasil yang dicapai. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan bermuara pada 4 (empat) sasaran, yaitu: (1) Meningkatkan kapasitas, peran dan prakarsa masyarakat sebagai pelaku atau aktor penting dalam pembangunan atau pengembangan kepariwisataan. (2) Meningkatkan status dan kualitas peran serta/partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata. (3) Meningkatkan nilai manfaat positif pengembangan pariwisata bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. (4) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kepariwisataan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2015 menempatkan Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan nomor satu di Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di perkotaan lebih rendah daripada di pedesaan. Berdasarkan hasil sensus ekonomi nasional Maret 2015, rata-rata pengeluaran masyarakat miskin perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat miskin pedesaan atau kabupaten. Ketimpangan antara masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan tetap terlacak dari tahun ke tahun. Secara persentase, angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah terdapat di Kabupaten Wonosobo sebesar 21,42% dari total penduduk sebanyak 777.000 jiwa. Namun jika dilihat dari angka absolutnya, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tertinggi terdapat di Kabupaten Brebes sebesar 20% dari total penduduk 1,78 juta jiwa. Menurut Erisman, Kepala Badan Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah “Sehubungan dengan nasib masyarakat miskin di Jawa Tengah, sebagian besar dari mereka adalah lulusan sekolah dasar dengan pekerjaan di sektor industri pertanian” ([http://jateng.tribunnews.com/2016/02/24/brebes menduduki peringkat pertama jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, diakses 30 November 2016 pukul 06:00 WIB](http://jateng.tribunnews.com/2016/02/24/brebes%20menduduki%20peringkat%20pertama%20jumlah%20penduduk%20miskin%20di%20Jawa%20Tengah,%20diakses%2030%20November%202016%20pukul%2006:00%20WIB)). Keadaan ini menunjukkan perlunya perhatian yang serius dan upaya perbaikan yang mendasar untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Meningkatnya kesadaran akan perlunya upaya efektif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kapital dan sosial (Sumardjo, 2: 2010).

Brebes menjadi salah satu Kabupaten selain dikenal dengan sebutan kota bawang, kota telur asin, dan selanjutnya kota beras hitam, memiliki beragam potensi pariwisata yang belum dikembangkan secara maksimal. Berdasarkan data peninjauan di lapangan terdapat cukup banyak sekolah yang berdekatan dengan potensi obyek wisata. Kondisi inilah yang memicu munculnya aksi sosial dalam rangka pengembangan desa wisata di Kabupaten Brebes dengan sinergi antara tokoh pemuda setempat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Brebes divisi Bina Pemuda dan Olahraga, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, serta SMA dan SMK setempat.

Menyambut konsep Balkondes (Balai Ekonomi Desa) yang dikemukakan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno serta *top three*, Menteri Pariwisata Arief Yahya di 2017, mengembangkan desa wisata (*community development*). Diharapkan desa wisata di Brebes dapat berkembang secepat proyek pemerintah saat ini yaitu pembangunan desa

wisata dengan penduduk lokal di Borobudur, sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat yang jauh lebih meningkat.. Di dalam Balkondas selain memiliki homestay juga terdapat rumah makan dengan masakan khas daerah, menjual kerajinan daerah, pentas seni budaya daerah, juga dapat dijadikan sebagai wadah perkumpulan berbagai komunitas kreatif yang dikelola warga dengan kepala desa (BUMNDes) .

Selain program Balkondes, Brebes juga ingin berpartisipasi merespon konsep “Gerakan Digitalisasi Homestay” Kementerian Pariwisata yang sudah banyak dilaksanakan di 15 wilayah Indonesia yaitu Dieng Kulon, Kabupaten Magelang, Yogyakarta, Samosir, Derawan, Bali, Lombok Tengah, Lumajang, Kabupaten Malang, Banyuwangi, Batam, Toba Samosir, Pasuruan, Boyolali, dan Labuan Bajo. Ada dua program inti Kemenpar, yang pertama yaitu sosialisasi sadar wisata bersama Sapta Pesona. Kedua, digitalisasi homestay di desa wisata agar bisa langsung go digital dan berdaya saing di era global dengan bermitra dengan ITX (Indonesia Tourism Xchange), sebuah pasar digital yang menjadi marketplace online untuk jasa pariwisata di Indonesia, sehingga kemampuan menjangkau pasar global melalui digital semakin terbuka. ITX akan digunakan sebagai alat untuk menghubungkan penjual dan pembeli satu sama lain secara online. Lebih cerdas dalam menyesuaikan paket dengan selera pengunjung, maka homestay desa wisata akan menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung, dengan proses transaksi langsung (<http://nasional.indopos.co.id/read/2017/4/21/95862/Program-homestay> Kementerian Pariwisata akan didukung oleh Kementerian Bisnis. Diakses tanggal 14 Mei 2017, 10.38 WIB).

Konsep aksi sosial dengan melibatkan guru dan siswa SMK/ SMA/ MA memiliki landasan pemikiran bahwa jika sekolah dimaksimalkan, maka potensi wisata tersebut akan lestari dan terkonservasi dengan baik. Kultur dalam budaya Brebes mempercayai bahwa orang yang bersekolah paling dapat dipercaya, karena mereka memiliki pemikiran dan argumentasi yang sifatnya ilmiah. Pendidikan di tingkat SMA dan sederajatnya bagi sebagian besar masyarakat Brebes merupakan salah satu level pendidikan tertinggi yang bisa mereka raih, sehingga diharapkan mereka memiliki kesiapan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan bentuk-bentuk usaha baru yang muncul sebagai manfaat positif dari pengembangan desa wisata. Di sisi lain, masyarakat Brebes yang lulusan SMA dan sederajatnya juga memiliki kecenderungan merantau yang cukup tinggi untuk mencari pekerjaan ke luar daerah maupun ke luar negeri, dan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes hampir 50% dari lulusan tersebut menjadi pengangguran.

Kajian potensi desa wisata dapat menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan program-program pengembangan selanjutnya yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi serta situasi daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan salah satu cita-cita Ki Hajar Dewantara “Sekolah Menjadi Pelestari Budaya”, makalah ini akan membahas bagaimana pengembangan desa wisata di Kabupaten Brebes sebagai bagian dari aksi sosial dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan perekonomian, pelestari budaya dan konservasi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dapat dirumuskan bahwa bagaimana konsep aksi sosial dalam pengembangan potensi desa wisata di Kabupaten Brebes dapat menjadi prototype bagi program selanjutnya, dengan menganalisa beberapa permasalahan yang ada yaitu: (1) Pemerintah belum memiliki konsep untuk memaksimalkan potensi wisata dan belum memiliki peta wisata (obyek wisata, rumah

makan, penginapan, pusat oleh-oleh khas), (2) Pemerintah belum memiliki konsep pemberdayaan masyarakat di sekitar obyek wisata yang bersinergi dengan sekolahan, (3) Sekolah (Guru dan Siswa) belum memiliki kesadaran bahwa mereka seharusnya turut peduli dan melestarikan potensi wisata yang ada.

### **Tujuan**

Untuk menguraikan bagaimana konsep aksi sosial pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Brebes ini dapat mencapai tujuan-tujuan diantaranya sebagai berikut: (1) Melestarikan potensi wisata, budaya setempat *tangible* (situs sejarah, tari-tarian dan sebagainya) *and intangible (story telling)*, (2) PAD (Pendapatan Asli Daerah) mengalami peningkatan, (3) Mengurangi angka pengangguran (penanggulangan kemiskinan), (4) Konservasi *low budget*, (5) Mendekatkan para siswa dengan sejarah setempat (generasi yang berbudaya).

### **Metoda**

Metoda dalam makalah ini menggunakan interview, observasi, dan telaah literatur. Metode studi literatur didapat dengan menggunakan teknik studi kepustakaan berupa buku, dan artikel ilmiah yang relevan.

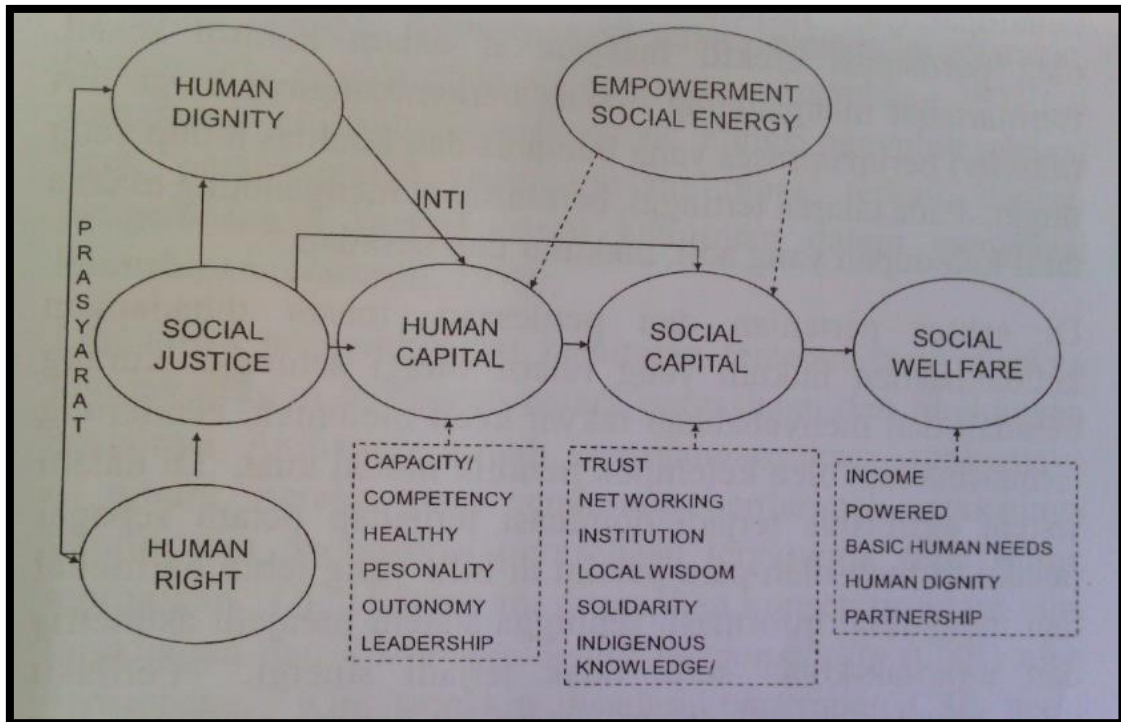
## **TINJAUAN TEORI**

### **Pengembangan Masyarakat Desa Wisata**

Pada tahapan pengembangan masyarakat, secara ideal dapat berjalan efektif dan efisien apabila berfokus juga pada perkembangan senergi sosial dan budaya kreatif dari masyarakat. Terdapat tiga elemen energi sosial budaya kreatif yaitu: a) *ideals*, b) *ideas*, dan c) *friendship*. *Ideals* merupakan situasi ideal yang akan dicapai pada tahapan pengembangan masyarakat, meliputi kejelasan tujuan, harapan, visi serta cita-cita yang akan diraih bersama. *Ideals* apabila diimplementasikan dengan baik akan mengarahka pada kejelasan *ideas*, yang meliputi cara yang akan dilakukan bersama dalam mewujudkan *ideals*, meliputi kejelasan strategi, program, kegiatan, metoda atau tehnik yang dikembangkan secara kreatif dan tepat guna. *Ideas* merupakan panduan pedoman untuk mengembangkan *friendship* yaitu jaringan kerjasama yang terjalin melalui penerapan kemitraan sinergis (Sumardjo, 4-5:2010).

Peningkatan kapital manusia dan kapital sosial sebagai dasar dalam mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan sosial yang kondusif seperti budaya, hukum, ekonomi dan politik yang kondusif seperti penegakan hak asasi manusia (*human right*), kepastian hukum (*social justice*), serta menghargai martabat manusia (*human dignity*) sangat dibutuhkan dalam pengembangan kapoital manusia dan kapital sosial disamping investasi sosial. Peningkatan energi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan faktor pendorong bagi terciptanya kesejahteraan sosial. Keterkaitan antara antara kesejahteraan, kapital manusia, kapital sosial dan faktor yang mempengaruhi seperti tersaji pada Gambar 1 berikut.





Gambar 1. Keterkaitan logis antara kesejahteraan, kapital manusia, kapital sosial dan faktor yang mempengaruhi (Sumardjo, 9:2010).

### Aksi Sosial Dari Sisi Etimologi dan Terminologi

Pada konsep pembangunan terdapat tiga kategori teori yaitu teori tahapan pembangunan, teori perubahan struktural, dan teori pembangunan berkelanjutan. Teori tahapan pembangunan berkembang pada tahun 1950-1960 memiliki fokus utama pada tahapan pertumbuhan ekonomi yang berpendapat bahwa proses pembangunan merupakan suatu urutan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai taraf suatu masyarakat modern (Sitompul, 2009). Teori ini mengenal dua model. Model pertama dikembangkan oleh Harod dan Domar. Model ini menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memerlukan adanya investasi. Semakin besar tabungan maka investasi akan semakin besar, maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Hal yang akan terjadi disisi lain adalah apabila semakin rendah produktivitas kapital, maka pertumbuhan ekonominya semakin rendah (ibid).

Model kedua dikemukakan oleh Rostow dalam Sitompul (2009) bahwa perubahan yang besar dilalui hampir oleh sebagian besar negara. Tahapan dari negara tertinggal menjadi negara berkembang atau maju dapat dijabarkan melalui tingkatan pada tahapan pembangunan. Sama seperti model pertama, model ini juga menganggap bahwa upaya untuk memajukan suatu negara melalui pertumbuhan ekonominya adalah melalui investasi. Aksi sosial secara etimologi merupakan kegiatan, tindakan, perilaku, perbuatan dengan orientasi tujuan tertentu.

Dapat disimpulkan melalui kedua model tersebut bahwa teori tahapan pembangunan menyatakan bahwa ada proses yang dilalui agar sebuah negara menjadi maju yaitu melalui adanya investasi yang menjadi alasan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Teori yang kedua adalah teori perubahan struktural. Teori ini berfokus pada mekanisme transformasi struktur dari perekonomian negara terbelakang yang masih tradisional ke arah perekonomian modern yang didominasi sektor manufaktur dan jasa

(Sitompul, 2009). Berbeda dengan teori tahapan pembangunan yang berfokus pada kehadiran investasi, teori ini berfokus pada perubahan sistem ekonomi.

Makna sosial yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, kepedulian terhadap kepentingan umum, perilaku interpersonal atau berhubungan dengan proses sosial. Secara terminologi, Aksi sosial merupakan upaya menuju perubahan atau mencegah terjadinya perubahan “terhadap praktek” atau situasi sosial yang terdapat di masyarakat. Aksi sosial dapat dilakukan melalui beragam cara seperti jalur pendidikan, propaganda, persuasi atau tekanan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik dari proses perencanaan sosial. Abu Ahmad dirujuk dari kamus Sosiologi mengemukakan bahwa aksi sosial (*social action*) yaitu: 1) Aksi yang dilakukan oleh pribadi dalam situasi sosial; 2) Aksi yang tertuju pada suatu kelompok; 3) Tindakan yang terorganisasi dengan tujuan untuk mengadakan reformasi; 4) Aspek perilaku manusia yang dapat diperhitungkan dari sudut kebudayaan (Ahmad, 1990).

Kamus Sosiologi menjelaskan bahwa aksi sosial adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok dan semua itu pasti mempunyai tujuan yang pasti karena ilmu Sosiologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk memahami perilaku sosial secara interpretatif supaya diperoleh kejelasan mengenai sebab-sebabnya, prosesnya, serta efeknya. Suatu gejala akan disebut perilaku hanya sepanjang seseorang atau beberapa orang terlibat dalam aksi subyektif yang berarti bagi mereka. Perilaku itu mungkin bersifat mental atau eksternal, perilaku itu mungkin merupakan aktivitas atau keadaan pasif. Istilah perilaku sosial akan dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan yang bertujuan sebagaimana ditafsirkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan (Soekanto, 2002).

Jika aksi dapat dipersamakan dengan perilaku atau tindakan, maka menurut Max Weber bentuk perilaku sosial yang paling penting adalah perilaku sosial timbal balik. Gejala itu kemudian tercermin dalam pengertian hubungan sosial, yang menurut Weber menjadi tema sentral dalam ilmu Sosiologi. Suatu hubungan sosial ada apabila para individu secara mutual mendasarkan perilaku pada perilaku yang diharapkan oleh pihak-pihak lain. Perilaku manusia yang merupakan perilaku sosial harus mempunyai tujuan tertentu yang terwujud dengan jelas dan perilaku itu harus mempunyai arti bagi pihak-pihak yang terlibat, tidak semua jenis perilaku, walaupun nyata dan bersifat formal, merupakan perilaku sosial. Sikap-sikap subyektif hanya merupakan perilaku sosial, apabila berorientasi ke perilaku pihak-pihak lain, misalnya; perilaku keagamaan tidak bersifat sosial apabila perilaku tersebut hanya merupakan doa belaka dan kegiatan ekonomis seseorang bersifat sosial apabila hal itu ada hubungan dengan pihak yang ketiga (Soekanto, 2002).

### **Jenis-Jenis Aksi Sosial**

Terdapat beberapa jenis aksi sosial diantaranya adalah; aksi sosial keagamaan, aksi sosial kemasyarakatan, aksi sosial individu, aksi sosial ekonomi dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. Aksi Sosial Keagamaan

Aksi sosial yang dilakukan untuk pelaksanaan ajaran agamanya, contohnya dengan membagi-bagikan kitab suci atau brosur keagamaan, gambar-gambar dan buku yang berisi tentang ajaran agama.

b. Aksi Sosial Kemasyarakatan

Aksi sosial yang dilakukan dengan memperhatikan tuntutan sekitar seperti aspek sosial yang berada di lingkungan sekolah, rumah sakit dan organisasi umum, lingkungan sekitar Gereja, dan lain-lain.

c. Aksi Sosial Individu

Aksi sosial yang dilakukan oleh individu dalam situasi sosial, aksi sosial ini dilakukan seseorang atau sendirian tanpa melibatkan orang lain biasanya aksi sosial seperti ini dilakukan seorang kepada warga disekitarnya yang kurang mampu.

d. Aksi Sosial Ekonomi

Aksi sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam situasi sosial, aksi ini biasanya dilakukan atas dasar kebutuhan ekonomi atau pangan. Berdasarkan informasi dari kamus Sosiologi, aksi sosial merupakan tindakan atau perilaku manusia yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pada situasi sosial tertentu dan memiliki tujuan. Perilaku sosial sebagai bagian dari perilaku manusia harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga perilaku tersebut dapat bermakna bagi seluruh pihak yang melakukan aksi sosial.

### **Rekayasa Sosial**

Rekayasa sosial (*social engineering*) pada prinsipnya berupaya mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki. Rekayasa sosial merupakan perubahan sosial yang direncanakan (*planned social change*). Pada rekayasa sosial seringkali mengupayakan cara atau strategi agar terwujudnya kehidupan sosial yang lebih baik. Hal ini dikarenakan situasi sosial yang ada sebelumnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, beberapa diantaranya timbul akibat dampak dari modernisasi yang memunculkan beragam permasalahan sosial.

Rekayasa sosial terdiri dari campur tangan gerakan ilmiah yang memiliki suatu visi ideal dan bertujuan untuk menghadirkan perubahan sosial secara sistematis dan terencana. Gerakan ilmiah ini biasanya berupa suatu gagasan terhadap perubahan tingkat atau taraf hidup untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Perubahan sosial perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, sehingga dapat mengakomodir keinginan masyarakat menuju arah yang lebih baik.

Jalaludin Rakhmat mengemukakan bahwa rekayasa sosial timbul karena adanya beberapa kekeliruan pemikiran manusia dalam menghadapi masalah sosial atau *intellectual cul-de-sac* sebagai gambaran dari buntunya proses berpikir. Ragam bentuk kekeliruan pemikiran yang lain yaitu permasalahan sosial kerap dikaitkan dengan mitos atau kepercayaan terhadap suatu gerakan abstrak, “ilusi” yang tanpa disadari dapat merubah tatanan kehidupan bermasyarakat. Rekayasa sosial perlu dilakukan agar kekeliruan berpikir dapat diantisipasi dan mendapatkan solusi sehingga dalam menghadapi suatu permasalahan masyarakat dapat lebih nyata atau konkrit. Sentimen atas suatu kondisi juga dapat menimbulkan adanya rekayasa sosial. Paradigma masyarakat perlu dirombak ulang untuk mengawali adanya suatu perubahan.

Jalaluddin Rahmat dalam Ramadlan (2013) mengemukakan bahwa perubahan sosial melalui rekayasa sosial dapat diawali dengan merubah cara berpikir untuk mencapai tujuan yang diharapkan sehingga dapat meminimalisir adanya kekeliruan dalam berpikir. Salah satu contoh kekeliruan berpikir yaitu adanya kebuntuan berpikir yang dapat dialami oleh beragam kalangan dan berkaitan dengan adanya mitos-mitos yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat. Rekayasa sosial muncul didasari adanya permasalahan sosial. Penyebab munculnya permasalahan sosial adalah karena



ketidakselarasan antara situasi apa yang seharusnya, yang diinginkan (*das sollen*) dengan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*). Rekayasa sosial juga merupakan komponen dari aksi sosial.

Aksi sosial merupakan tindakan kolektif untuk mengurangi atau mengatasi masalah sosial. Dalam penelitian rekayasa sosial, biasanya dijabarkan dengan mengidentifikasi indikator- indikator antara lain: a. Sebab perubahan (*cause of change*): tujuan sosial yang diharapkan memberikan jawaban mengenai problem sosial; b. Sang pelaku perubahan (*agent of change*): individu, kelompok, atau organisasi yang berupaya melakukan rekayasa sosial; c. Sasaran perubahan (*target of change*): individu, kelompok, atau komunitas yang menjadi sasaran rekayasa sosial; d. Saluran perubahan (*channel of change*): media yang digunakan sebagai saluran untuk melakukan rekayasa sosial; e. Strategi perubahan (*strategy of change*): metode atau teknik-teknik utama yang digunakan untuk melakukan rekayasa sosial.

### **Fungsi Rekayasa Sosial**

Terdapat tiga fungsi dalam rekayasa sosial yaitu, rekayasa sosial sebagai alat kontrol sosial, alat politik, dan alat pemersatu bangsa dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. **Rekayasa Sosial Sebagai Alat Kontrol Sosial**

Penyelesaian konflik memiliki beragam cara dalam kehidupan di masyarakat, karena apabila kurang dikelola dengan baik dapat memicu munculnya konflik lain, baik konflik emosional, psikologis, ataupun konflik yang menimbulkan kontak fisik antar individu atau kelompok. Gerakan ilmiah dan campur tangannya merupakan sasaran kajian rekayasa sosial untuk dapat menginspirasi masyarakat menuju arah yang lebih baik untuk suatu tujuan bersama. Kecenderungan masyarakat adalah meyakini suatu hal jika hal tersebut merupakan pembenaran umum yang diyakini banyak orang. Hal ini menyebabkan masyarakat dari golongan intelektual seringkali memiliki perbedaan sudut pandang dan timbul ego untuk pembenaran pemikirannya. Rekayasa sosial memiliki peran dalam merubah situasi ini melalui ide perubahan sosial ke arah yang lebih baik, untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam misi perubahan sosial. Pola kontrol sosial bertujuan untuk menghadirkan ruang aktualisasi dan tidak semata untuk mengendalikan masyarakat, sehingga dalam proses perubahan sosial masyarakat memiliki peran yang jelas.

b. **Rekayasa Sosial Sebagai Alat Politik**

Politik dan Rekayasa memiliki keterkaitan satu sama lain dan memiliki orientasi untuk mengelola masyarakat dalam mencapai suatu tujuan, lingkup rekayasa sosial lebih luas dan tidak hanya terkait dengan kekuasaan. Pada dinamika politik, rekayasa sosial seringkali dijadikan alat dalam memperoleh dukungan publik. Perubahan sosial dapat dipicu oleh politik jika masyarakat partisipasi secara aktif sebagai pengambil keputusan dari suatu perubahan. Situasi yang lazim terjadi hanya pemerintah yang berperan utama, sedangkan masyarakat hanya menjadi partisipan. Pemahaman serta tujuan yang sama terkait perubahan sosial sangat diperlukan dalam mewujudkan perubahan sosial. William Dahl mengemukakan bahwa dalam politik pemahaman mengenai perubahan sosial dapat lebih mudah jika masyarakat dibagi menjadi dua kelompok yaitu masyarakat dari golongan konservatif dan masyarakat dari golongan radikal. Sudut pandang yang berbeda dari kedua kelompok dapat memunculkan konfrontasi sehingga permasalahan yang paling substantif dari konflik ini dapat menjadi rujukan referensi dalam melakukan perubahan sosial.

c. **Rekayasa Sosial Sebagai Alat Pemersatu Bangsa.**

Rekayasa sosial dapat menciptakan integrasi diantara masyarakat, berkaitan dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menilik dari sejarah Indonesia bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia diraih dengan gigih karena keinginan yang kuat untuk Merdeka, hal ini muncul karenakondisi yang serupa, serta masyarakat yang merasa senasib dan sepenanggungan.

**Pentingnya pengembangan Desa Wisata**

Agenda pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau keberpihakan pembangunan terhadap masyarakat miskin (*pro poor development*) pada agenda pembangunan sesuai agenda SDGs merupakan salah satu perhatian utama pembangunan dalam hal sektoral. Demikian halnya di sektor pariwisata, "*pro poor tourism development*" merupakan tujuan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Konsep pengembangan "*pro poor tourism development*" di lini pariwisata dapat mensukseskan pengentasan kemiskinan apabila dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Wujud efektifitas dari pelaksanaan konsep tersebut dapat dicermati berdasarkan pada dampak yang ditimbulkan dari suatu kawasan atau destinasi yang kemudian berkembang menjadi sebuah destinasi yang dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal/domestik maupun asing. Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat sebagai dampak positif dari pembelanjaan wisatawan dan kegiatan fisik maupun non fisik yang terjadi di kawasan tersebut merupakan faktor-faktor pendorong (Buku Laporan Akhir, 2010).

Model/ Instrumen Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata, antara lain adalah :

- a. Pengembangan Desa Wisata
- b. Pengembangan Desa di sekitar ODTW
- c. Pengembangan Ekowisata
- d. Pengembangan Wisata Agro
- e. Pengembangan Wisata Ziarah
- f. Bentuk pengembangan lainnya (Kemitraan Usaha Pariwisata)

Beberapa alasan yang mendasari mengapa pariwisata dengan segala dampak yang ditimbulkannya mampu membantu dalam pengentasan kemiskinan yaitu:

- 1) Sektor pariwisata sangat terkait dengan beragam sektor dan lini usaha. Perkembangan industri pariwisata yang massif dapat mendorong beragam peluang usaha sehingga memunculkan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) dan nilai ekonomi yang tinggi bagi seluruh pihak. *Multiplier effect* memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung yang berkaitan dengan usaha kecil, menengah atau di sektor hulu seperti pertanian dan peternakan. Spektrum dampak pengembangan pariwisata seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2.

Gambar 2. Spektrum Dampak Pengembangan Pariwisata yang mempunyai keterkaitan dengan berbagai sektor, pengembangan wilayah, dan peluangnya terhadap pengentasan kemiskinan

- 2) Daya tarik sektor pariwisata yang memiliki tingkat jangkauan yang sangat luas dan mampu menjangkau hingga daerah terpencil (*remote area*), merupakan peluang penting bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin yang sebagian besar diantaranya hidup dan tinggal di daerah pedalaman.
- 3) Tersedianya kesempatan dan peluang dukungan kegiatan masyarakat lokal yaitu kegiatan pertanian dan kerajinan khas setempat yang kemudian dapat didistribusikan melalui kegiatan pengembangan wisata.
- 4) Pariwisata adalah industri yang memerlukan dan dapat menyerap banyak pekerja untuk beragam golongan dan anggota masyarakat.
- 5) Sektor wisata juga dapat menghasilkan keuntungan yang sifatnya non-material yaitu pelestarian kawasan, kebanggaan pada budaya lokal yang dimiliki, sekaligus semangat positif bagi masyarakat agar semakin maju dan mengasah potensi diri.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Konsep Aksi Sosial dan Rekeyasa Sosial Pengembangan Desa Wisata

Merujuk pada konsep aksi sosial, maka pengembangan desa wisata termasuk kedalam kategori aksi sosial kemasyarakatan. Dimana aksi sosial dilakukan dengan mencermati kebutuhan masyarakat yaitu aspek sosial pada lingkungan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi.

Jika dipetakan dalam tiga fungsi rekeyasa sosial maka desa wisata Cilibur, sebagai lokasi pertama pengembangan desa wisata termasuk kedalam fungsi rekeyasa Sosial Sebagai Alat Kontrol Sosial, dimana pada konsep ini seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa dalam masyarakat memiliki beragam cara dalam menyelesaikan

konflik yang dapat berpotensi menciptakan konflik lainnya, baik dalam bentuk konflik emosional, atau berujung pada konflik yang memicu perselisihan secara fisik antar individu atau kelompok.

Situasi sebelumnya terdapat konflik di desa Cilibur, diantaranya dikarenakan informasi terkait potensi wisata sejarah yang sudah meluas, seperti keberadaan candi-candi kecil, informasi ini menyebabkan desa Cilibur cukup sering dikunjungi oleh wisatawan asing, dan ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan hal ini dengan menjual bagian-bagian dari batu candi kepada wisatawan asing tersebut. Mereka belum menyadari bahwa seharusnya yang mereka lakukan adalah konservasi dengan turut menjaga peninggalan sejarah yang ada di desa Cilibur.

Konflik lainnya muncul dikarenakan masyarakat Brebes pada masa sebelumnya memang masih kental dengan ajaran peninggalan nenek moyang yang awalnya menganut agama Hindu, maka hingga kini ada sebagian masyarakat yang justru mengkeramatkan keberadaan candi-candi tersebut sebagai tempat pemujaan (ngalap berkah) pada hari-hari tertentu mereka menaruh beragam sesaji, bung-bunga maupun kemenyan di sekitar lokasi candi. Gerakan ilmiah yang bertujuan untuk memberikan pandangan masyarakat ke arah yang lebih baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu, merupakan objek dari bidang kajian rekayasa sosial. Di sisi lain ajaran agama yang dianut masyarakat Cilibur saat ini mayoritas adalah muslim, maka dilakukan upaya edukasi agar lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelestarian lokasi situs dan benda-benda bersejarah, bukan ke arah pemujaan dan bersifat mistis.

Tingkat partisipasi masyarakat memerlukan pengembangan secara berkelanjutan dan *indigeneous knowledge* serta *social capital* adalah beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan (Sumardjo, 19:2010). Kecenderungan yang terjadi di masyarakat secara umum yakin terhadap sesuatu jika sebagian besar masyarakat juga meyakinkannya hal tersebut. Masyarakat yang berada pada golongan kaum intelektual sering kali memiliki perdebatan dalam mengemukakan pendapatnya dari satu sudut pandang tertentu untuk mendapatkan pengakuan dan pembenaran dari sisi tertentu. Rekayasa sosial memiliki peran penting untuk menengahi perbedaan pendapat masyarakat.

#### **Identifikasi indikator- indikator dalam penelitian rekayasa sosial:**

- a. Sebab perubahan (*cause of change*): tujuan sosial yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sosial; (1) Melestarikan potensi wisata, budaya setempat *tangible* (situs sejarah, tari-tarian dan sebagainya) *and intangible* (*story telling*), (2) PAD (Pendapatan Asli Daerah) mengalami peningkatan, (3) Mengurangi angka pengangguran (penanggulan kemiskinan), (4) Konservasi *low budget*, (5) Mendekatkan para siswa dengan sejarah setempat (generasi yang berbudaya).
- b. Sang pelaku perubahan (*agent of change*): individu pejabat dari Dinas Pendidikan sebagai pegiat pelestarian dan peningkatan potensi lokal bekerjasama dengan organisasi dalam merealisasikan rekayasa sosial yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Brebes divisi Bina Pemuda dan Olahraga, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, serta SMA dan SMK setempat.
- c. Sasaran perubahan (*target of change*): masyarakat desa wisata di Kabupaten Brebes.
- d. Saluran perubahan (*channel of change*): media komunikasi tradisional dan media komunikasi modern.
- e. Strategi perubahan (*strategy of change*): metode yang diterapkan untuk melakukan rekayasa sosial, melalui sosialisasi konsep pengembangan yang dijabarkan sebagai berikut;

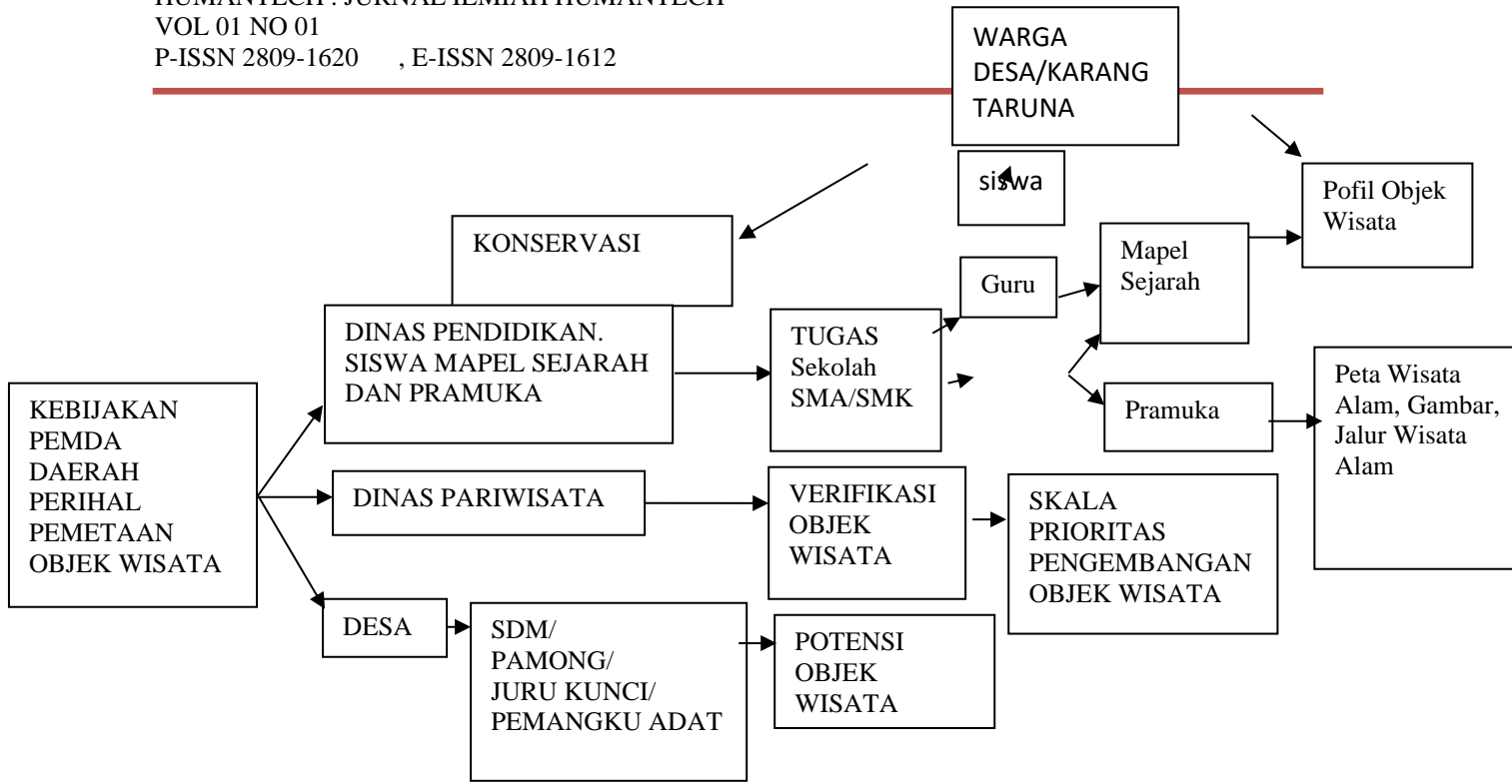
### **Konsep Pengembangan**

Memerlukan sebuah surat (instruksi) dari Bupati Brebes kepada; (1) Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, terkait pelibatan siswa sebagai agen dalam pengembangan desa wisata, Pemerintah Desa, (2) Siswa SMA/ SMK akan memetakan objek wisata terdekat yang ada diwilayahnya. (3) Hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi dasar bagi proses pemetaan selanjutnya di tingkat Kecamatan. Dinas Pendidikan, memberikan pengarahannya terkait: (1) Siswa SMA/SMK agar memetakan objek wisata terdekat diwilayahnya. (2) Setiap sekolah menghasilkan pemetaan, lalu dilakukan observasi kelayakan untuk dijadikan obyek wisata, dengan pemandunya adalah Bapak/ Ibu gurunya. Proses pemetaan ini juga dapat dilakukan dalam kerangka kegiatan Pramuka (dengan pembuatan peta hiking, lintas alam, wisata offroad dan lain sebagainya), bekerjasama dengan guru Sejarah melakukan pendalaman dan penggalian sejarah lokal dan budaya setempat *tangible* (situs sejarah, tari-tarian dan sebagainya) *and intangible* (*story telling*). Selain memetakan obyek wisata, siswa juga sekaligus dapat melakukan proses publikasi.

Mengikuti konsep Balkondes dalam desa wisata dapat menyediakan tempat makan yang menyajikan masakan lokal khas setempat, menjual beragam bentuk kerajinan khas lokal, menyediakan lokasi untuk menampilkan seni budaya setempat, serta dapat dimanfaatkan sebagai lokasi perkumpulan berbagai komunitas kreatif untuk semakin meningkatkan pengetahuan dan perekonomian masyarakat. Brebes juga akan menerapkan Program inti dari kementerian pariwisata, yaitu sosialisasi Sadar Wisata dengan Sapta Pesona. Serta digitalisasi desa wisata agar semakin berkembang dan siap bersaing di era global untuk menarik minat para wisatawan berkunjung ke Kabupaten Brebes.

Dengan penerapan konsep pengembangan desa wisata diharapkan proses konservasi obyek wisata dapat dilakukan tanpa biaya, desa juga akan memiliki peta wisata. Siswa SMA/SMK juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan objek wisata disekitar sekolah, seperti aksi kebersihan lingkungan, memposting foto “selfie” kegiatan di lokasi obyek wisata untuk menyebarkan informasi, serta menumbuhkan potensi ekonomi. Setelah mendapatkan informasi detail dari pihak sekolah maka akan di tindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata dalam merumuskan Blue Print pariwisata daerah, dan Universitas Muhadi Setiabudi turut mendampingi proses pengembangan desa wisata secara keseluruhan serta memberikan masukan yang sifatnya konstruktif. Konsep Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Desa Wisata seperti tersaji pada Gambar 3.





Gambar 3. Konsep Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Desa Wisata

Gambar Sekolah yang Berdampingan Dengan Obyek Wisata Sebagai Lokasi Pengembangan Desa Wisata

A. SMK Maarif 2 Paguyangan (Situs Candi Pangkuan Cilibur)



B. SMK Maarif NU 01 Ketanggungan (Air Terjun Rambu Kacang, Kampung Budaya Jalawasthu, Air Panas Lewi Panas)



C. SMK Maarif 1 Paguyangan (Waduk Penjalin)



D. SMK Agribisnis (Pantai Randusanga)



E. SMK Al Azhar Salem (Ranto Canyon)



F. SMK Islam T Huda (Museum Purbakala Mini)



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Aksi sosial pengembangan desa wisata di Kabupaten Brebes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan awalan gerakan dari masyarakat yang mengharapkan respon berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Brebes, dalam mengembangkan potensi-potensi daerah wisata, salah satunya adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam skema desentralisasi sangat diperlukan dalam pembangunan daerah untuk menciptakan adanya kontrol sosial dari masyarakat. Pada berbagai praktik perencanaan pengembangan desa wisata di Indonesia, seringkali realitas masyarakat yang ada tidak secara komprehensif dipahami oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Bahkan masyarakat tidak dilibatkan didalamnya, yang menyebabkan terjadinya *miss communication* antara pemerintah, dan masyarakat. Padahal kurangnya partisipasi dan komunikasi dengan masyarakat akan berdampak pada hasil kebijakan serta efektifitas program itu sendiri.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mutlak diperlukan pada era reformasi seperti sekarang ini. Pembangunan hanya akan menjadikan masyarakat sebagai objek tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki (*sense of belonging*) terhadap program pembangunan yang sedang dijalankan. Disinilah pentingnya sebuah proses komunikasi pembangunan yang baik dan efektif. Peran masyarakat secara aktif diposisikan sebagai subjek pembangunan dengan pola komunikasi partisipatoris, sehingga dapat berperan sejak awal yaitu perancangan, pelaksanaan program, sampai pada tahapan monitoring serta evaluasi program.

Tantangan kedepan adalah bagaimana agar rancangan yang telah dibuat dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan efektif, melalui



pengembangan *human capital* sehingga semakin meningkatkan perekonomian masyarakat. Kapasitas masyarakat yang semakin meningkat dapat menjadi bekal bagi pengembangan baik di bidang sosial, budaya dan kreatifitas dapat semakin dikembangkan sebagai aset *social capital*. Kekuatan dari kapital sosial merupakan sumber untuk membuat masyarakat bergerak dan memiliki inisiatif melalui beragam institusi sosial serta interaksi sosial. Peran penting dari kapital sosial adalah mampu menciptakan responsifitas pemerintah daerah sehingga dapat lebih efektif dan efisien, yang diawali oleh kekuatan dan kedinamisan dari masyarakatnya (Sumardjo, 21:2010).

### Saran

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pengembangan desa wisata di Kabupaten Brebes, diharapkan dapat mengakomodir *real need* dan *felt need* dari masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat di tingkat lokal dan potensi kapital sosial dapat menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dalam meningkatkan keberhasilan pengembangan desa wisata. Pemerintah daerah perlu untuk mencermati potensi-potensi kapital sosial yang ada di masyarakat, sehingga dapat mengimplementasikan dengan tepat kebijakan yang dikeluarkan untuk pengembangan desa-desa yang ada diwilayahnya menuju skema desentralisasi (Sumardjo, 21:2010).

Dalam rangka optimalisasi pariwisata terkait dengan tujuan dan agenda pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayah tertinggal, maka pengembangan wilayah pedesaan sebagai objek dan daya tarik wisata (desa wisata), memiliki posisi dan nilai yang sangat strategis dan perlu terus didorong langkah-langkah pelaksanaannya. Atas dasar nilai strategis yang dimiliki tersebut diatas, pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan melalui posisi strategis dan peran pariwisata sebagai jalur yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pengembangan desa wisata.

Desa wisata di Kabupaten Brebes dalam pengembangannya memerlukan upaya-upaya identifikasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai salah satu andalan pariwisata Kabupaten Brebes, maka diperlukan pula peningkatan sarana dan prasarana penunjang sebagai kelengkapan teknis operasional untuk jangka panjang. Sehingga desa wisata di Kabupaten Brebes kedepannya dapat memiliki daya saing yang tinggi, dengan mengaplikasikan konsep pariwisata berkelanjutan yang partisipatif dan memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*), kapital sosial (*social capital*), dan pengetahuan lokal (*indigeneous knowledge*).

### Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (1990). *Kamus Lengkap Sosiologi*. Solo: CV Aneka.
- Buku Laporan Akhir. (2010). *Identifikasi Desa Wisata DI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: PT. Cipta Nindita Buana.
- Nasional Indopos. 2017. <http://nasional.indopos.co.id/read/2017/04/21/95862/Program-Homestay-Kemenpar-Bakal-Disupport-Kementerian-BUMN>, di akses 14 Mei 2017, 10.38 WIB.
- Rachmat, Jalaludin dalam Said Romadlan. (2013). *Rekayasa Sosial (Social Engineering) Adopsi Teknologi Komunikasi (Internet) di Kalangan Pondok Pesantren Muhammadiyah*. FISIP-UHAMKA.
- Sitompul, FR. (2009). *Merancang Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan Pendekatan System Dynamics*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solita, Sarwono. (1993). *Sosiologi Kesehatan, Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumardjo. (2009). *Improvement The Capacity of Social Capital and Quality of Community Development Facilitator for Sustainability*. Proceeding Seminar Nasional Development Communication FORKAPI.
- Sumardjo. (2010). *Penyuluhan Menuju Pengembangan Kapital Manusia dan Kapital Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Tribunnews Jateng. 2016. (<http://jateng.tribunnews.com/2016/02/24/brebes-peringkat-pertama-jumlah-penduduk-miskin-di-jateng>, diakses 30 November 2016, pukul 06.00 WIB).